

**TUNTUTAN PERLINDUNGAN LAHAN PURUN
(STUDI KASUS PERAJINAN PURUN DI
KECAMATAN PEDAMARAN TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR)**



Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana S1 dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

MEIYANTI

1657020067

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

2020

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING
UJIAN MUNAQOSYAH

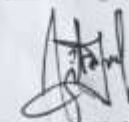
Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa saudari **Meiyanti** dengan NIM 1657020067 Prodi Ilmu Politik sudah dapat mengikuti Ujian MUNAQOSYAH di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Palembang, 23 April 2021

Pembimbing I


Ainur Ropik, M.Si
NIP : 197906192007101005

Pembimbing II


Vita Justisi, M.H., M.Kn
NIDN : 2014056902

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Meiyanti
Nim : 1657020067
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Tuntutan Perlindungan Lahan Puran (Studi Kasus Perajinan Puran
Di Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Telah dimunafasahkan dalam sidang *Online* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Kamis / 27 Mei 2021
Tempat : Di Rumah Via *Online (daring)* melalui Aplikasi Zoom.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program
Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 09 Juni 2021

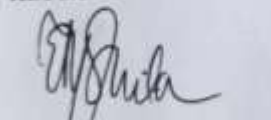
DEKAN,



Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

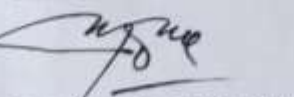
TIM PENGUJI

KETUA



Dr. Ed Yusnita, S.Ag M.Hi
NIP. 197409242007012016

PENGUJI 1



Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

SEKRETARIS



Raegen Harahap, M. BA
NIP. 2011059202

PENGUJI 2



Ryllian Chandra Eka Viana, MA
NIP. 198604052019031011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meiyanti

Nim : 1657020067

Jurusan : ilmu Politik

Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Yang Layak Sebagai Warga Negara dalam perspektif politik (studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun Sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedemaran Oki)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Raden fatah Palembang maupun di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 23 April 2021



Meiyanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

‘ ‘Sesungguhnya Allah akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri’ ’(QS.Ar Ra’d:11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena KepadaNyalah kami menyembah dan KepadaNyalah kami mohon pertolongan sekaligus sebagian ungkap terimaku kepada:

1. Ibuku (Solbiah) tercinta/terkasih yang selalu memberiku motivasi dalam hidupku, dan semangatnya lah aku bisa bertahan sampai sekarang. Maaf kan anakmu belum bisa membalas semua pengorbananmu saat ini.
2. Bapak(Darwis) tesayang terimakasih atas kasih sayangmu dan terimakasih menjadi sosok bapak yang hebat dan luar biasa.
3. Ayukku(crisna mareta) tanpamu mungkin aku tak bisa merasakan bangku kuliah, terimakasih atas kasih sayangmu pengorbanamu untuk ku sampai aku di titik serjana dengan gelas S.Sos.
4. Ayuk-adikku(Julia,nonayati.S.E,feni,dina) yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku terima kasih atas semuanya.
5. Pembimbing saya Bapak Ainur Ropik, S.Sos., M.Si dan Vita Justisia, M.H.,M.Kn.
6. Dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Raegen Harahap, MA.
7. Erik Darmawan, S.IP.,M.H.I
8. Calon imamku(Abu hasan saputra, S.P)
9. Teman-temanku satu angkatan 2016 ilpol B (Indra, Firman, Wawan,Jodi, shandika,Hari,Irvan,Tomi,jujun,Ilham,lutfi,Aam,Ibnu,andra,abu,agung,he ndra,mastal,zizah,indah,herlin)
10. Teman rasa saudara (septi perwati)
11. Sahabatkuu cherrybelle(lara,evi,liga,enis,mayang) terima kasih sudah menjadi bagian keluargaku ke 2.

Abstrak

Penelitian ini berjudul Upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian kecamatan pedamaran). Ojek dalam penelitian ini yaitu pemerintahan kayuagung yang terlibat dalam proses pelaksanaan dari perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik, Teori yang digunakan ialah teori politik kewarganegaraan K.C.Where. Teori konsitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara, dan teori dinilai yang menentukan keterangan-keterangan saling berhubungan. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa pihak yang terlibat secara langsung dalam teori politik kewarganegaraan. Upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berita online, lampiran, gambaran dan foto serta dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tekni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik untuk saat ini kebijakan dari pemerintah kayuagung dalam mengatasi perlindungan lahan rawa gambut dalam pembuatan perda belum terlaksanakan tetapi salah satu upaya telah dilakukan masyarakat pedamaran dengan cara beramai-ramai demo di kantor Pemkab Oki dan DPRD untuk segera mengeluarkan perda, meminta pembagian lahan rawa gambut dilarang untuk diahli fungsikan kegunaanya atau lahan yang dilestarikan oleh pemerintah untuk masyarakat pedamaran agar tetap digunakan untuk pembuatan anyaman.

Kata kunci: Teori Kewarganegaraan dan lahan rawa gambut

Abstract

This research is entitled efforts to protect the right to live a decent life as citizens from a political perspective. The purpose of this research is to find out how to protect the right to live as citizens from a political perspective (a study of the availability of purun land as a source of livelihood for the sub-district of pedamaran, the object of this research is the kayuagung government which is involved in the implementation process of efforts to protect the right to live as citizens in a political perspective. The theory used is the k.c. where citizenship political theory. Constitutional theory is the entire constitutional system of a collection of regulation that from, regulate or rule in the government of a country, and a judged theory that determines the interrelated statements. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The primary data sources in this research are those who are directly involved in the theory of citizenship, the effort to protect the right to live as a citizen in a political perspective, while the secondary data sources in this study are online news, attachments, pictures and photos and documents. Data collection in this study was carried out through in-depth interviews, observation and documentation techniques. The results of the study show that efforts to protect the right to a decent life as citizens in a political perspective, at the moment, the government of kayuagung policies in overcoming the protection of peat swamp land in the drafting of regional regulations has not been implemented, but one of the efforts has been made by the pedamaran community by means of mass demonstrations at the Oki district government office and the DPRD to immediately issue a regional regulation so that peatlands are protected from the ecosystem of the pedamaran community asking that the distribution of peat swamp land is prohibited from being expertly user or land that is conserved by the government for the pedamaran community so that it is still used for making weaving.

Keywords: citizenship theory and peat swamp land

Daftar Isi

Daftar Isi	viii
Kata Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Kegunaan Penelitian	7
E.Tinjauan Pustaka.....	7
F.Kerangka Teori.....	9
G.Metodologi Penelitian	12
a. Metode Penelitian atau Pendekatan	12
b. Data dan Sumber data	12
c. Lokasi Penelitian.....	13
d. Teknik Pengumpulan Data.....	13
BAB II	17
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Kecamatan Pedamaran Timur	17
1. Sejarah Pedamaran Timur.....	17
2. Letak Geografis.....	21
BAB III.....	29
HASIL DAN PEMBAHASAN	29
BAB IV	47
PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47

B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Gambar Kebakaran Lahan di Pedamaran.....	33
Gambar 3.1 Gambut.....	35
Gambar 4.1 Gambar Kebakaran Lahan Gambut	36
Gambar 8.1 Gambar Demo di Kantor Bupati	38
Gambar 9.1 Gambar Demo untuk Menuntut Perda	37
Gambar 10.1 Gambar Demo di Kantor DPRD untuk Menuntut Perda	41
Gambar 5.1 Gambar Peta Pedamaran.....	42
Gambar 6.1 Gambar Bahan Purun	43

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahwat dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul, "Upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik (Studi Tentang Ketersediaan Lahan purun Sebagai sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran Oki)

Skripsi ini disusun sebagai tugas paripuna sebagai Mahasiswa Prodi ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial strata satu pada Program Studi Ilmu Politik. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.A. sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UIN Raden Fatah Palembang.
3. Dr. Yenrizal, M.si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ainur Ropik, S.Sos, M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus pembimbing 1 skripsi saya.
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang.

6. Dr. Eti Yusnita, S.Ag, M.N.I sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik Fisip UIN Raden Fatah Palembang.
7. Ryllian Chandra Eka Viana, MA. Sebagai Seketaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
8. Raegen Harahap, MA sebagai penasehat Akademik saya yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Seluruh Staf Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang.
10. PEMKAB OKI, DPRD.
11. Semua Pihak Yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dan masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi

Wabarokatuh

Palembang

Meiyanti

1657020067

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak warga negara merupakan suatu wewenang atau kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hukum itu berkaitan antara setiap orang, setiap masyarakat, setiap lembaga, dan setiap negara. Setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali¹. Ini merupakan perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negaranya dimanapun berada. Perlindungan bagi setiap warga negara kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya.

Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Aline ke 4 (empat). Yang berbunyi a). Melindungi segenap bangsa tumpah darah Indonesia, b). Memajukan kesejahteraan bangsa c). Mencerdaskan kehidupan bangsa. d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dengan berdasakan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,

¹ Ali Yuswandi. *Penuntutan, Hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm.1.

kemanusiaan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan².

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status kewarganegaraan Indonesia, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus yaitu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak dan kewajiban, Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia sebagian juga telah di tetapkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Sehingga pemerintahan Negara Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaannya.

Kesamaan dasar hukum dan hak adalah salah satu kewajiban yang harus diakui di Indonesia merupakan kedudukan yang sama didepan hukum. Didalam konstitusi Indonesia dalam pasal 28 D yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminaan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sebagaimana di dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) disebutkan harus adanya kedudukan yang sama didepan hukum termasuk dalam konteks penegakan hukum³.

² B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Praticce*, (The Hague Martinus Niihoff 1965) Hlm 279

³ Dikutip dari tensis Muhammad.Ryan Bakry *Implementasi hak asasi manusia dalam konsep Good Governance di Indonesia*. FH UI. Hlm 26

Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Beberapa kejadian pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman HAM tidak sebatas karena hak itu dimiliki oleh masyarakat namun juga pelayanan terhadap hak itu perlu dilakukan oleh semua masyarakat. Pada tingkatan lain, apresiasi terhadap HAM di Indonesia perlu pula dipertajam agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah besar. Tetapi juga perlu membahas tentang hak warga negara kepemilikan lahan purun gambut.

Di Sumatera Selatan mempunyai kawasan bergambut seluas 1,4 juta ha atau 16,3 % dari luas wilayah, dan kondisi tersebut merupakan salah satu sumberdaya alam yang potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Purun adalah tumbuhan sejenis rumput atau gulma yang banyak tumbuhan di wilayah gambut, tumbuhan ini subur di gambut yang basah ketimbang kering sejenis purun tumbuhan rumput liar mirip pandan yang tumbuh subur di wilayah basah di kawasan rawa bergambut, batangnya tegak, tidak bercabang dengan warna hijau mengkilat sepanjang 50 sampai 200 centimeter purun cocok dijadikan bahan baku kerajinan karena dianggap tahan lama. Kuat dan nyaman saat digunakan.

Pengambilan purun di lahan gambut di era 1970 yang dikenal dengan kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Sumatera Selatan, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, mempunyai dampak yang sangat nyata, baik terhadap kondisi fisik lahan dan taraf hidup masyarakat ekonomi

sekitarnya. Eksploitasi hutan secara besar besar pada era 1970 an menghasilkan perubahan yang cukup nyata terhadap kondisi hutan di Sumatera Selatan.

Persoalan lahan gambut terus menjadi pokok krusial butuh penanganan khusus, selain bakal dimanfaatkan untuk pangan, lahan gambut sumsel dipastikan semakin terjaga dengan adanya perda gambut sudah dikeluarkan sejak tahun 2018 ini. Kepala Dinas lingkungan Hidup dan pertahanan provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. Edward Candra, M.H. membuka langsung sosialisasi supervisi pelaksanaan pemulihan Ekosistem gambut dikawasan berizin, bertempat di Hotel Swarna Dwipa. Dalam melindungi dan mengelolah ekosistem gambut agar lebih baik serta efektif di masa yang akan datang, untuk itu pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah membuat peraturan pelaksanaan perda provinsi Sumsel Nomor 01 tahun 2018 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Sedangkan di desa Pedamaran Oki untuk pemerintahan provinsi sudah buat perda berlaku satun provinsi, Termasuk dipakai di pedesaan seperti berlakunya UUD , karena itulah pengelolaan lahan gambut didesa Pedamaran Oki belum maksimal. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang lahan gambut menimbulkan masalah sosial berupa pengambilan lahan gambut yang menimbulkan konflik sosial yang merugikan masyarakat setempat. Walaupun telah menimbulkan masalah tetapi pemerintah desa belum mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin karena permainan politik uang atau apapun yang mempunyai keuntungan untuk pemerintah desa.⁴

⁴ Adam(nama samara), masyarakat pedamaran

Kondisi degradasi lahan gambut saat ini ditemukan tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, hal ini disebabkan oleh. Keterbatasan informasi dan data tentang hutan rawa gambut di Sumatera Selatan yang merupakan salah satu indikasi rendahnya perhatian dari seluruh pihak dan rendahnya kegiatan penelitian yang dilakukan, disisi lain database purun rawa gambut merupakan kebutuhan dasar untuk kegiatan di lahan gambut dalam mendukung pelestarian sumberdaya alam purun rawa gambut.

Potensi sumber daya alam purun gambut perlu dipertahankan kelestariannya, sehingga peranan purun gambut tetap mampu mendukung kehidupan dan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada setiap kondisi dan lokasi secara tepat, terukur, terkendali, dan berkelanjutan pada suatu kondisi lahan adalah sangat berperan penting dalam proses konservasi gambut.

Adanya konsep *Clean Development Mechanism* (CDM) yang memungkinkan dilakukannya perdagangan karbon (*carbon trade*) juga membuka peluang untuk memanfaatkan lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat konservasi. Produksi anyaman tikar di Sumatera Selatan, sejenis purun tumbuhan rumput liar mirip pandan yang tumbuh subur di wilayah basah di kawasan rawa bergambut batangnya tegak, tidak bercabang dengan warna hijau mengkilat sepanjang 50 sampai 200 centimeter purun cocok di jadikan bahan baku kerajinan karena dianggap tahan lama. kuat dan nyaman disaat digunakan.

Kecamatan Pedamaran yang dulunya disebut Marga Danau, memiliki luas wilayah 150.000 H dan memiliki gambut seluas 120.000 H. dengan jumlah

penduduk 45, 448 jiwa, yang mayoritas rumah penduduknya berbentuk rumah panggung dan rumah rakit yang menetap di sungai, bagi masyarakat pedamaran menganyam tikar purun bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk menjaga tradisi leluhur yang hingga kini terus di lestarikan tetapi, tradisi tikar purun itu terancam punah karena semakin sempitnya lahan gambut yang menjadi habitat asli purun. Penyempitan lahan gambut mulai terasa sejak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, wilayah gambut Pedamaran belum disentuh konsesi (Pemberian Hak atau izin oleh Pemerintah), Hampir semua gambut dangkal basah subur dan kaya dengan purun.⁵

Belum lagi ahli fungsi lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit dan yang tersisa sebagian besar masuk ke konsesi 1.000 H, sebagian besar masuk ke konsesi 8 perusahaan dan yang tersisa dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat Hanya 30 H. akan tetapi yang telah dimanfaatkan masyarakat baru 4 H saja.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana Upaya Perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan Pedamaran)

⁵ Penyimpangan lahan gambut mulai terasa sejak kebakaran hutan dan lahan.pada tahun 2015
<https://m.rri.co.id>. Akses pada tanggal 24-11-2019

⁶Ahli fungsi lahan gambut. Rri.co.id.akses pada tanggal 24-11-2019

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI).

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, serta tambahan literatur dalam pengembangan keilmuan bidang ilmu politik dan memberi sumbangan kajian mengenai fenomena baru, yang berkaitan dengan penyelesaian Untuk mengetahui upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi kasus ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh civitas akademik UIN Raden Fatah, para penelitian, pengamat politik sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai ‘Upaya Perlindungan Hak untuk Hidup yang Layak sebagai Warga Negara dalam perspektif politik (studi ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI).

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kabupaten OKI Kecamatan Pedamaran). Namun ada beberapa penelitian yang menurut penelitian dapat dijadikan rujukan sebagai

pembandingan, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi penelitian antara lain penelitian.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eko Hidayat Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia”. Di dalam penegakan Ham masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orde baru. Pada masa orde baru banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan, baik berat maupun ringan dan pada masa itu tidak terdapat peraturan perundang-undangan mengenai penegakan HAM. Tidak seperti masa reformasi yang memiliki peraturan tersebut. Perbedaan dalam peneliti adalah dari tingkat kasus, dan kota yang ditujuberdasarkan uraian tersebut, penelitian mencoba untuk melakukan penelitian terhadap Desa Pedamaran Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI. Sebab itu, penelitian memilih judul “upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian) Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh RifʼAn fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Peman Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) ini, Negara mempunyai peranan yang penting, yakni menjaga hak hidup manusia dalam hal ini adalah rakyat. Hal ini tentunya menunjukkan

pada kita semua, bahwa pada dasarnya hukum islam jauh lebih baik awal menerapkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ario Adrianto Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Islam. Hak asasi tersebut antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak berkeluarganya, hak untuk mendapatkan keadilan, hak rasa aman, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan. Perbedaan dalam peneliti adalah dari tingkat kasus, dan kota yang dituju Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mencoba untuk melakukan penelitian terhadap Desa Pedamaran Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI. Sebab itu, penelitian memilih judul “Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup yang Layak Sebagai Warga Negara (studi kasus ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian) Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI.

F. Kerangka Teori

Warga negara adalah mengandung pengertian anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Sederhana warga negara dapat diartikan sebagai: warga atau anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (bahasa inggris) yang mempunyai arti, warga negara Penduduk dari sebuah kota. sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air atau bawahan. Sedangkan menurut As Hikam warga negara adalah sebuah komunikasi yang membentuk negara itu sendiri.

Dengan memiliki status sebagai warga negara orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini sendiri tercermin dalam hak dan kewajiban, seperti halnya dalam secara timbal balik. Seorang anggota hak dan kewajiban kepada organisasi, demikian sebaliknya organisasi, demikian sebaliknya organisasipun memiliki hak dan kewajiban terhadap anggota.⁷

Dalam sebuah organisasi maka hubungan itu berbentuk sebagai sebuah peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Seorang memiliki hak dan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air. Karena politik kewarganegaraan dapat dibentuk dalam masyarakat di seputaran kehidupan banyak prinsip hidup yang harus ditaati, secara umum di golongan dalam 6 pemikiran yaitu. K.C. Wheare, Herman Heiler, L.j Van Apeldoorn , Koernimanto soertopa wiro, Carl Schmitt.⁸

1. K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.
2. Herman Heller pengertian konstitusi menurut para ahli, kali ini menurut Herman Heller adalah konstitusi mempunyai arti luas dari pada undang-undang. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
3. Koernimanto Soetopawiro, pengertian konstitusi menurut para ahli juga dikeluarkan oleh koernimanto soetopawiro. Menurutnya, istilah konstitusi

⁷ Narmo Dwi,S.Pd.,M.Mi.*Paradigma iain Pendidikan Kewarganegaraan.Bumi Aksara,Jakarta.2006*

⁸ Ditjenpp.Kemenkumham.go.id

berasal dari bahasa latin cisme yang bearti bersama dengan dan statute yang bearti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi bearti menetapkan secara bersama.

4. Carl Schmitt, Carl Schmitt membagi konstitusi dalam 4 pengertian yaitu:
 1. konstitusi dalam arti absolute mempunyai 4 sub pengertian yaitu;
 - a. konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara.
 - b. Konstitusi sebagai bentuk Negara.
 - c. Konstitusi sebagai factor integrasi.
 - d. Konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji sejauh mana tingkat perhatian pemerintahan terhadap masyarakat dalam upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik, cakupannya yang sangat luas mulai dari kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai penentuan nasib masyarakat pedamaran kedepannya semua dibahas dalam politik kewarganegaraan seperti yang dijelaskan menurut K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

Dari penjabaran di atas penelitian yang berjudul upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan

Pedamaran OKI) akan di teliti menggunakan teori politik kewarganegaraan, karena teori tersebut peneliti anggap yang paling tepat untuk melihat dan menjelaskan sejauh mana tingkat pemerintahan terhadap masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian atau Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan suatu situasi dan kondisi yang ada secara kongkrit dari objek penelitian tersebut. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini juga berguna untuk memahami fenomena yang dialami dari subjek penelitian tersebut. Menurut Bagdon dan Taylor pendekatan kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹

b. Data dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (informasi atau responden melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh

⁹ Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) H.25.

peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu sumber pertama atau informasinya berupa PEMKAB OKI, DPRD OKI dan Pedamaran karena informasi tersebut memiliki data-data dan informasi yang berkaitan dengan peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang untuk memperkuat data primer. Dalam data sekunder penelitian yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pedamaran Timur. Pedamaran Oki. Pemkab Oki. DPRD. Dinas Pertanahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.¹⁰ Teknik pengumpulan yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu melakukan wawancara/interview, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yang dimana penelitian sebagai besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas

¹⁰ Sutopo, *Metode penelitian kualitatif*, sukarta: sebelas Maret Universerty Press, 2002, hlm.50.

antara penelitian dengan subyek penelitian. dalam proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang disiapkan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepala desa, tokoh adat, pemuka agama dan tokoh masyarakat di tempat objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Pedamaran Timur, Pedamaran Oki, PEMKAB Oki, DPRD, Dinas Pertanahan.

Teknik analisis data proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan informasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

¹¹ Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, CV, 2017, hlm244.

selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Dengan reduksi, maka penelitian merangkum, mengambil data yang pokok dan penting membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka.¹²

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan- bagan, hubungan antar kategori, *flowhart* dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan Huberman (1984) nyatakan yang paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹³

3. Menarik Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apa bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

¹² Ibid, hlm 247

¹³ Ibid, hlm 252

¹⁴ Ibid, hlm, 252

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian yang berjudul ”upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian kecamatan pedamaran)”, yang berfokus pada nilai lokal masyarakat pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang gambaran umum suatu wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, dalam hal ini terdapat dua hal yang akan peneliti jelaskan tentang lokasi penelitian yaitu gambaran umum Kecamatan Pedamaran.

A. Kecamatan Pedamaran Timur

1. Sejarah Pedamaran Timur

Pedamaran merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada Kabupaten Ogan komering ilir (OkI), provinsi sumatera selatan yang mayoritas penduduknya berasal dari satu rumpun keturunan, sisanya sebagai kecil dari suku pulau jaya yakni penduduk desa transmigrasi. Kendati demikian, asal usul Pedamaran masih sering menjadi kontroversi di masyarakat. Meskipun sebagai besar masyarakat mengakui bahwa kata pedamaran berasal dari kata dasar damar, sebuah tumbuhan yang memiliki getah. Sudah kental masyarakat setempat mengakui asal muasal masyarakat pedamaran diyakni berasal dari suku melayu daerah meranjat kabupaten ogan ilir (OI) saat ini sekitar perjalanan mobil 2 jam dari pedamaran yang

merantau ke wilayah daratan untuk mengambil kayu damar. Kayu damar ini habitat aslinya berasal dari Melanesia untuk bagian timur. Tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getahnya dan diolah menjadi kopal tumbuhan ini banyak dijumpai di daerah pegunungan, tetapi terkadang juga dapat hidup dan berkembang di dataran rendah

Bentuk pohonnya tegak meninggi dengan percabangan yang tidak terlalu lebar daunnya agak tebal dan tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan baku dalam memproduksi berbagai produk seperti pernis, cat, tinta, kemenyan, dempul dan kosmetik. Entah darimana mula ceritanya para orang tua yang ada di Pedamaran beryakinan pedamaran berasal dari kata damar yang kemudian di tambah awalan pe dan akhirnya an, sehingga menjadi “pedamaran” yang artinya daerah pohon damar. “nenek moyang berasal dari meranjat yang merantau di daerah pedamaran dengan menggunakan alat transportasi perahu. dan perahu tersebut sering di letakkan di lebon tebakar saat sekarang di masjid jamik, desa pedamaran II dan nenek moyang kita tersebut di kubur di pemakaman umum desa pedamaran III yang kalau tidak salah namanya kinang,” ungkap salah satu sesepuh di desa padamaran masyarakat setempat kepada peneliti. Kendati demikian sehingga saat ini tanda peninggalan tanaman kayu damar tidak Nampak terlihat di wilayah ini, sehingga sebagian kelompok masyarakat justru lebih cenderung meyakini asal usul nenek moyang masyarakat pedamaran berasal dari pulau jawa. Hal ini didukung dengan banyaknya perkuburan atau yang sering disebut warga setempat keramat 9 sakti yang

diduga berasal dari pulau jawa, seperti keramat pulau sekampung karena keramat tanjung ketak dan keramat lainnya keyakinan ini juga diperkuat adanya fakta bahwa di pulau jawa ada perkampungan perkuburan keramat nenek moyang orang pedamaran.

Berdasarkan opini penelusuran dan cerita masyarakat serta fakta peninggalan yang ada, maka timbul dua versi yakni kelompok yang meyakini nenek moyang Pedamaran berasal dari meranjat dan kelompok yang meyakini nenek moyang mereka berasal dari jawa. Kelompok yang pertama yakni bahwa konon menurut cerita, orang meranjat merantau ke pedamaran untuk mencari damar (tidak di ketahui tahunnya), selanjutnya menetap dan tinggal di Pedamaran faktanya ini diperkuat dengan terbentuknya desa serinanti yang diyakni sebagai tempat orang meranjat menunggu atau menanti damar. Keyakinan masyarakat kelompok ini didukung dengan beberapa kesamaan bahasa antara meranjat dengan Pedamaran tetapi bahasa meranjat sedikit berayu meliuk sementara Pedamaran lebih tegas dan kasar bahkan pada zaman marga pedamaran atau marga danau pernah dipimpin depati deraham asal meranjat selama 26 tahun, yakni dari tahun 115-1841.

Kelompok ke dua yakni bahwa pada zaman dahulu kala tidak diketahui tahunnya orang dari pulau jawa atau dari samudra pasai datang ke wilayah pedamaran dengan menggunakan perahu dan ketika memasuki sungai babatan (disepanjang wilayah perairan pedamaran) perahu mereka pecah dan tenggelam di dasar sungai. Orang-orang yang berhasil

menyelamatkan diri, kemudian bermukim di daerah tersebut fakta ini didukung di sekitar wilayah perairan bertetangga dengan kecamatan pedamaran ada sebuah lubuk besar yang diberi nama lubuk kemudi yang konon ditempat tersebut pernah di temukan kemudi kapal berukuran besar.

Selain penemuan tersebut salah satu bukti yang meyakinkan nenek moyang pedamaran asal jawa, ada beberapa kata bahasa pedamaran sama dengan bahasa jawa, bahkan ada pemimpin pedamaran zaman marga depati laduk memerintah pada tahun 1841-1842, wafat di pulau jawa kendati demikian belum ada sebuah tulisan yang mempunyai hak paten tentang asal usul dan sejarah pedamaran yang jelas berdasarkan fakta bahwa pemerintah pedamaran mulai diakui sejak adanya zaman marga hingga zaman pasirah yang diperintah oleh 17 orang. Yakni pemimpin pedamaran pertama kali yang diakui marga danau (marga asli pedamaran) yakni moyang rio asal pedamaran II yang memerintah pada tahun 1764-179.

Selanjutnya sebelum ada program transmigrasi di sumber hidup, wilayah ini merupakan hutan belantarandan masih masuk di wilayah Desa Pulau Geronggang, Tidak ada penghuni yang menetap di wilayah ini dahulu kala. Pada 25 desember 1982 kloter pertama transmigrasi datang dari jawa (orang dari jawa Barat, jawa Tengah, dan jawa Timur) kedaerah Pedamaran Timur. Salah satu desa yang ada di Pedamaran Timur adalah Desa sumber hidup yang merupakan desa transmigrasi, yang sampai tahun 1983 pesertanya berjumlah 500 KK. Masing- masingk diberi tanah seluas 2 hektar dengan rincian seperempat hektar untuk lokasi rumah dan tiga

perempatnya hektar untuk lahan persiapan untuk tanaman sayur-sayuran, cabai dan sebagainya yang bisa dipanen dalam waktu tiga bulan. Ditambah 1 hektar lagi untuk lahan tanaman padi atau kebun karet.

2. Letak Geografis

kecamatan Pedamaran timur merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten ogan komering dengan jarak ke ibu kota kabupaten kurang lebih 72km. kecamatan ini terletak di sebelah tenggara ibu kota kabupaten ogan komering ilir (kayuagung). Kecamatan ini terletak pada ketinggian kurang lebih 10 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 464,79 km², yang secara administrasi berbatasan dengan: setalah utara berbatasan dengan kecamatan Pedamaran, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Mesuji raja, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan pedamaran, sebelah timur berbatasan cengal dan kecamatan sungai menang.

Kecamatan Pedamaran Timur beriklim tropis. Musim kemarau umunya berkisar antara bulan mei sampai oktober dan musim hujan antara bulan November sampai april. Penyimpangan musim hujan. Namun saat ini cuaca sudah sulit diperkirakan kapan musim hujan berakhir dan kapan musim kemarau. Sebagian Besar Wilayah Kecamatan Pedamaran Timur merupakan dataran rendah. Beberapa desa dialiri oleh aliran sungai-sungai.



Sumber: BPS OKI

Gambar 2.1 Sketsa Peta Kecamatan Pedamaran Timur

Kecamatan Pedamaran Timur merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan sejak tahun 2006. Saat ini terdapat 7 desa definitive di Kecamatan Timur. Secara administrative Kecamatan Pedamaran Timur merupakan Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di antara Kecamatan-Kecamatan lain di Wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir. Ibu kota Kecamatan Pedamaran Timur berada di desa Sumber hidup. Sebagian besar Kantor-Kantor Instansi Pemerintahan berada di desa Sumber Hidup. Sementara itu, Kantor Kepolisian sektor dan Puskesmas berada di desa Gading Raja.

Tabel 2.1 Tabel Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedamaran Timur tahun 2017

Desa/Kelurahan	Luas (km)	Persentase
Mari Baya	37,62	8,09
Pulau Geronggang	88,41	19,02
Gading Rejo	48,64	10,47
Sumber Hidup	55,24	11,89
Panca Warna	67,72	14,57
Tanjung Makmur	108,25	23,29
Kayu Labu	58,91	12,67
Pedamaran Timur	464,79	100,00

Sumber: Kantor Camat Pedamaran Timur

1. Kependudukan dan ketenagakerjaan

Kecamatan Pedamaran Timur pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 22.806 jiwa, terdiri dari 11.647 jiwa laki-laki dan 11.159 Perempuan. Kalau dilihat dari angka tersebut, di Kecamatan ini jumlah Penduduk laki-laki lebih banyak dari Perempuan dengan sex ratio 104,37, artinya dari 100 orang perempuan terdapat lebih kurang 104 orang laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun merupakan kelompok umur dengan tertinggi di antara kelompok umur lain. Terdapat 1.174 Jiwa Perempuan Umur 5-9 Tahun. Sementara itu kelompok umur 75+ merupakan kelompok umur dengan jumlah penduduk terendah.

Dependency ratio (rasio ketergantungan) Penduduk di kecamatan Pedamaran.

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Pedamaran Timur Tahun 2017

Desa Kelurahan		Jumlah penduduk		
		Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Mari Baya	724	620	1.344
2	Pulau Geronggang	3.486	4.024	7.510
3	Gading Rejo	1.027	971	1.998
4	Sumber Hidup	1.451	1.397	2.848
5	Panca Warna	2.497	2.085	4.582
6	Tanjung Makmur	1.469	1.262	2.731
7	Kayu Labu	993	800	1.793
Pedamaran Timur		11.647	11.159	22.806

Sumber: proyeksi Penduduk BPS Statistik Kabupaten Ogan Komering ilir

2. SOSIAL

Stuktur Sosial Masyarakat di Kecamatan Pedamaran Pimur cukup beragam. Sebagaian wilayah Pedamaran Timur merupakan basis tranmigrasi sejak tahun 1980-an sehingga banyak terdapat suku jawa dan sunda mendiami Wilayah tersebut, adapun suku asli yang mandiami wilayah Pedamaran Timur sejak dahulu kala adalah masih dalam rumpun suku

penesak. Secara Umum Kecamatan Pedamaran Timur telah mengalami perkembangan yang cukup baik ditinjau dari fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sekolah negeri khususnya SD dan SMP telah tersebar merata di seluruh desa. Sementara itu 1 SMK dan SMA juga telah berdiri di sekitar Ibu Kota Kecamatan. Di sisi lain, fasilitas kesehatan terutama poskesdes dan polides telah tersedia di tiap desa sedangkan 1 Puskesmas dan 1 Puskemas Pembantun juga berdiri di sekitar Ibu Kota Kecamatan. Untuk ukuran Kecamatan Pedamaran Timur yang hanya terdiri dari desa, fasilitas Pendidikan dan Kesehatan sudah cukup memadai.

Tabel 2.3 Jumlah Sekolah Menurut Desa di Kecamatan Pedamaran Timur 2017

	Desa/Kelurahan	PAUD	TK	SD	SLTP	SMA/SMK	Akademi/PT
1	Mari Baya	1	-	1	-	-	-
2	Pulau Geronggang	2	-	4	1	-	-
3	Gading Rejo	1	2	1	-	1	-
4	Sumber Hidup	1	1	2	2	1	-
5	Panca Warna	2	3	2	2	-	-
6	Tanjung Makmur	1	1	2	1	-	-
7	Kayu Labu	1	2	2	1	-	-
Pedamaran Timur		9	9	14	7	2	-

Sumber: Kantor Desa Kecamatan Pedamaran Timur

3. PERTANIAN

Mayoritas Penduduk di Kecamatan Pedamaran Timur merupakan petani karet dan sawit. Selain bertani di kebun sendiri, sebanyak juga di antaranya yang menjadi buruh perusaha perkebunan swasta yang berbasis di Wilayah Kecamatan Pedamaran Timur. Tanaman lain yang diusahakan petani disini yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, cabe, dan kacang panjang.

Tabel 2.4 Luas Lahan Menurut Jenis Lahan yang Digunakan di Kecamatan Pedamaran Timur (Hektar) 2016-2017

Jenis Lahan	2016	2017
Sawah	3.733	3.733
Tegal/Kebun	1.412	1.412
Lading/Huma	764	764
Sementara Tidak Diusahakan	4.471	4.471

Sumber: Dinas Kesehatan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir

4. Transportasi dan komunikasi

Seluruh desa dalam Kecamatan Pedamaran Timur dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu ada satu desa yang menggunakan jalur desa sekaligus jalur sungai, yaitu desa kayu labu. Sebagian besar jalan yang menghubungkan antar desa masih berupa tanah yang diperkeras atau koral. Sedangkan sarana transportasi umum antara desa masih sangat jarang selain

objek. Sementara itu transportasi umum antar kecamatan dapat menggunakan mobil angkutan umum yang hanya melalui lima dari tujuh desa Kecamatan Pedamaran Timur. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat sudah banyak yang menggunakan telepon seluler. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan menara telepon seluler yang ada di Kecamatan Timur sebanyak enam buah menara.

Tabel 2.5 Tabel Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan di Kecamatan Pedamaran Timur (Km) 2016-2017

Jenis Permukaan Jalan	2016	2017
Aspal	29,23	14,4
Beton	10,28	4,59
Kerikil	-	69,43
Tanah	4	1,02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKI

**Tabel 2.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis kendaraan di
Kecamatan Pedamaran Timur 2015-2017**

Jenis Kendaraan Bermotor	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	112	117	125
Bus	6	6	8
Truk, Box, Pick Up	67	71	80
Sepeda Motor	2.193	2.302	2.532

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten OKI

**Tabel 2.7 Keberadaan Menara Telepon Seluler di Kecamatan Padamaran
2016**

Desa/Kelurahan		Keberadaan Menara Telepon Seluler	
		Ada	Tidak
1	Mari Baya	✓	
2	Pulau Geronggang		✓
3	Gading Rejo	✓	
4	Sumber Hidup	✓	
5	Panca Warna	✓	
6	Tanjung Makmur	✓	
7	Kayu Labu	✓	

Sumber: Kantor Desa Kecamatan Pedamaran Timur.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti membahas tentang jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian kecamatan Pedamaran). Menurut teori K.C.Wheare, Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu Negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam suatu Negara .

Penelitian lebih berfokus pada lahan rawa gambut berupa kebijakan dan dampak yang ditimbulkan dan berkurangnya lahan rawa gambut di Pedamaran Timur. Teori kewarganegaraan dianggap peneliti mampu berpengaruh dalam menganalisis penelitian, yang bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik.

- A. Upaya perlindungan hak untuk hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir.

Kondisi Pedamaran merupakan perkampungan tua yang telah ada bahkan sebelum masehi. Penduduk nya memiliki kepercayaan, adat dan budaya dengan ciri khas kuat agama sebelum tersebarnya Islam di dunia menurut Cerita dari kepala desa, desa Kerajaan Danau dengan Rajanya yang bergelar Tuan Tigar danau. Kerajaan ini terletak disebelah selatan, yang kini merupakan daerah lebak atau danau yang di bernama Pedamaran tempat ini pada masa lalu di

sebut pula, Marga danau mereka mempunyai anak perempuan cantik yang terkenal dengan nama Putri danau atau Putri air.¹⁵sejarah pedamaran sudah dijelaskan dibagian bab II. Kecamatan Pedamaran Sumatera Selatan sangat tergantung pada keberdaan kawasan rawa gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seratus dua puluh hektar diantaranya berada di kawasan Pedamaran. Mereka memiliki tradisi membuat kerajinan yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka salah satunya berembak atau menganyam tikar dan bahan baku purun yang merupakan tanaman asli rawa gambut jauh sebelum wilayah Pedamaran dimasuki perkebunan sawit, Masyarakat disana menggunakan lahan secara arif sehingga tidak pernah terjadi kebakaran diwilayah ini.

Sudah tercantum dalam pasal upaya perlindungan hak untuk hidup yang layak sebagai warga negara dalam perspektif politik yang berbunyi di dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Menyebutkan bahwa,” tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang bagi kemanusiaan.”¹⁶”Ayat tersebut membuat pengakuan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dimana untuk pasal 28 d 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Kedua, pemerintahan harus

¹⁵ <https://id.m.wikipedia.org.Pedamaran,ogan> komering ilir.akses pada tanggal.9.maret.2021.

¹⁶ Pasal 27 ayat(2) UUD NRI 1945.jdih. kemenken.go.id.diakses pada tanggal 18-03-2021

menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga harus tunduk dan taat aturan.¹⁷

Menurut para ahli kewarganegaraan yang menyiratkan status kebebasan dan tanggung jawab oleh warga Negara, yang memiliki hak dan tanggung jawab kewarganegaraan memiliki kesetiaan, perpajakan, dan dinas militer Kewarganegaraan ini memiliki bentuk kewarganegaraan yang paling istimewa .

Kewajiban kewarganegaraan Indonesia harus menaati hukum dan pemerintah.

1. Wajib ikut serta dalam pembelaan Negara
2. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
3. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan pada undang-undang
4. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dalam Negara .¹⁸

Setelah peneliti melakukan wawancara diperoleh beberapa keterangan antara lain. Perluasnya perkebunan sawit yang meluas di lahan gambut merupakan faktor yang bisa menjadi ancaman masyarakat pedamaran timur Kabupaten Oki, karena lahan gambut merupakan jantung kehidupan masyarakat pedamaran timur dari segi tergantung ekonomi dan kehidupan sosialnya.¹⁹

¹⁷ UUD pasal 28 ayat 1.putusan. mahkamahagung.go.id.diakses pada tanggal 18-03-2021

¹⁸Kewarganegaraan menyiratkan status kebebasan dan tanggung jawab oleh Negara.

Hhttps://www.kampus.com.akses pada tanggal 24-02-2021

¹⁹ Kewajiban kewarganegaraan Indonesia harus menaati hukum dan pemerintah.https://www.suara.com.diakses pada tanggal 24-02-2021

Saat ini dengan masuknya perkebunan kelapa sawit sangat memengaruhi pertumbuhan purun dengan kondisi lahan rawa gambut sekarang sudah berubah memburuk. Karena kerap kekurangan air dan adanya kanalisasi yang dilakukan pihak perusahaan. Dari perkiraan luasnya lahan yang ada di kawasan sekitar 1.000 hektare saat ini hanya bersisa kurang lebih 200 hektare yang masih diakses warga Pedamaran Timur. Dari hasil wawancara saya dengan Kepala Desa (Kades) Pedamaran, “ *menganyam tikar purun merupakan tradisi yang masih kuat di kalangan perempuan. Kerajinan tikar purun menjadi penunjang ekonomi masyarakat setempat, Menurut pemerintah nampaknya belum ada yang serius melestarikan pasokan bahan bakunya* ” ²⁰.



Gambar 1.1

Keterangan di atas merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa fungsi kepala Desa di Pedamaran memang benar mengawasi lahan rawa gambut semakin hilang dan semakin rusak lahan sendiri yang memiliki banyak potensi

²⁰Hasil wawancara dengan Kepala Desa Meka Jaya Suparedi; pada tanggal 3-03-2020

sangat merugikan bagi masyarakat pedamaran timur, seperti anyaman tikar, kelempang ciri khas Pedamaran, dll yang ada di Pedamaran OKI. Merupakan penghasilan bagi warga setempat.



Gambar 1.1 Gambar Kebakaran Lahan di Pedamaran

Lahan gambut di Oki sangat luas terbagi dalam 2 kecamatan, Pedamaran di Kabupaten OKI, terbagi dua kecamatan Pedamaran Timur dengan luas sekitar selatan 105,979 ini merupakan rawa gambut yang banyak diperuntukkan bagi perkebunan sawit seperti dikawasan Sepucuk yang pernah dikunjungi Presiden Jokowi saat kebakaran 2015 lalu²¹.

Hanya sebagian kecil rawa gambut diPedamaran timur dijadikan persawahaan dan dibiarkan sebagai santra purun (rerumputan), bahan baku anyaman purun, jika kecamatan Pedamaran didominasi penduduk melayu Pedamaran timur dihuni transmigrasi, banyak upaya yang terkait restogasi gambut

²¹Gambaran kebakaran lahan di pedamaran. <https://www.mongabay.co.id/akses> pada tanggal 25-02-2021

diPedamaran, mulai dari bantuan pekerjaan teknis sekat kanal, sumur bar, program ekonomi kepada masyarakat, memberdaya petani sawit dengan menanam tanaman sela berupa nanas, alat produksi dan mesin jahit ²².

Jauh sebelum wilayah Pedamaran dimasuki perkebunan sawit, masyarakat disana menggunakan lahan secara arif, tidak pernah terjadi kebakaran diwilayah Pedamaran, sejak kawasan ini terbuka lebar atas nama investasi untuk industri perkebunan kelapa sawit dan HPH. Hampir setiap tahun kebakaran dikawasan gambut ini lahan produksi warga Pedamaran termasuk habitat purun sebagai penunjang perekonomian masyarakat terus menerus, dari 300 hektare habitat purun di lahan gambut hanya tersisa 200 hektare bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kondisi rawa berubah menjadi biofisik gambut disana pun semakin buruk, gambut menjadi kering dan mudah terbakar sering terjadi pengeringan akibat adanya kanalisasi.²³



²²Rawa gambut di pedamaran timur dijadikan persawaaan di biarkan sebagai santra purun. Pantau.gambut#ilustration.diakses pada tanggal 25-02-2021

²³ #paludikultrulindonesia

Gambar 2.1 Gambut

Hal yang terpenting dalam menghadapi karhutbunlah, yaitu kemauan untuk menjaga alam dan kemauan untuk memadamkan api. bersama mempersiapkan baik dari personal maupun alat selam, memaksimalkan anggaran yang ada untuk karhutbunlah. Dari APBD OKI sebesar Rp.3 Miliar, ada juga bantuan dari Gubernur Sumsel ke OKI senilai Rp. 8 Milyaran kebenaran data karhutbunlah 1 tahun sebelumnya, faktor disinyalir menjadi penyebab utama baik berbagai pemenuhan kebutuhan mulai dari pembukaan kebun, tanaman pangan, permukiman, penanganan karhutbunlah tahun ini akan difokuskan pada pencegahan jiak terjadi maka akan diklasifikasikan skala dan dampaknya.²⁴

Area hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Komering Ilir sepanjang 2018 mencapai 86 hektare. Jumlah ini meningkat secara signifikan dibandingkan luas hutan dan lahan yang terbakar sebelumnya tercatat 179 hektare. Kepala badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Listiadi Martin mengatakan bahwa kondisi yang mendorong semua pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan tahun ini .



²⁴ "tribunsumsel wiki.tribunnews.com

Gambar 3.1 Gambar Kebakaran Lahan Gambut

Sumatera Selatan menjadi sorotan pada tahun 2015 karena 736.563 hektare lahan dan hutan terbakar. Sekitar 500.000 hektare yang diantaranya di OKI pada tahun 2016 luas area yang terbakar OKI turun drastis menjadi 213 hektare susut bagi menjadi 179 hektare, dan kawasan sangat rawan luasnya 603.175 tersebar di 63 Desa.²⁵ Dalam wawancara bersama pak Agus Pauji SH.Msi (Kabag Hukum Pemkab OKI) dan pak Andrian Saputra SH.Msi (Kasubag UUD Pemkab OKI). *“Kalau yang saya ketahui, pertama-tama kita ini belum ada pengetahuan tentang perda tersebut atau belum ada kejelasan untuk selanjutnya keputusan masih di kantor DPRD, kerena tugas kami hanya mengesahkan saja perda²⁶ perdes”*.



²⁵ Tabloidkontras.com

²⁶ Agus pauji SH.Msi, (kasubbag perda hukum pemkab OKI)
Andirian saputra SH.Msi (kasubbag UUD pemkab OKI), Wawancara tanggal 14 januari 2021



Gambar 5.1 Gambar Demo untuk Menuntut Perda

Dimana ratusan perajian purun Pedamaran datangi kantor bupati OKI, lakukan demo dihadapan ratusan massa didominasi oleh kaum ibu-ibu yang bergabung menjadi solidaritas masyarakat Pedamaran bersatu (SMPB), saat berunjuk rasa dengan pengawalan ketat pihak keamanan di kantor bupati Ogan Komering Ilir OKI provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Selasa 13-3-2018 pagi, kita sangat mendukung apa yang kalian lakukan ini sebab memang sudah seharusnya ekosistemnya gambut purun dilestarikan terlebih lagi merupakan salah satu kearifan lokal, dimana sebagai bahan dasar tikar purun yang di gunakan para perajian. Namun ketahuilah untuk mewujudkan itu semua tidak cukup hanya dengan perkab silahkan kalian berunjuk rasa, tambah Sekda tetapi jangan sampai aksi yang kalian lakukan tersebut di jadikan alat kepentingan segelintir oknum yang

tidak bertanggung jawab seperti kalian ketahui bersama saat ini dalam massa tahapan pilkada.



Gambar 6.1 Gambar Demo di Kantor Bupati

Menurut pendapat bapak juniasyah Irawan SH.MH“Sedangkan aksi demo mereka tidak boleh mengambil ahli fungsi purun tersebut sebagaimana purun sudah di kelolah masyarakat dengan baik dan sudah masuk konsepsi dari itu mereka bisa masuk kedalam tata ruang purun atau tanaman purun. Kalau masalah perdes itu sudah ada yang mengatur yaitu RT dan RW yang menetapkan tata ruang wilayah itu nanti akan ditetapkan untuk berapa luas purun masalah perdes itu sudah melalui RT RW Pedamaran kalau tanggapan mereka demo kemaren sudah masuk di insatif dari DPRD untuk membuat pengajuan perdes, ternyata perdes belum bisa untuk di proses masih menunggu dari Pedamaran OKI dan DPRD seandainya RT RW sudah selesai atau sudah cukup di perdes saja pembuatan perdes tidak perlu lagi”.



Gambar 7.1 wawancara bersama bapak Juniansyah Irawan S.H.,M.H

Berdasarkan wawancara diatas Pemerintah Kota Kayuagung yang telah ada dan telah berjalan sesuai aturan walaupun masih banyak mengalami kekurangan dimana aksi demo Pedamaran tersebut untuk menuntut keadilan di hadapan Kantor Bupati dan DPRD untuk melindungi purun sebaga mata pencarian mereka agar segera turun kan perda (peraturan daerah) dilihatkan berdasarkan fakta-fakta yang ada mereka hanya meminta keadilan dari para pejabat agar segera memberikan pengajuan Perdes tesebut. Dengan demikian adanya kebijakan dari pemerintah dalam menangani masalah perda segera dilaksanakan dengan cepat, dimana kebijakan tersebut dilaksanakan demi menjaga purun dan di manfaatkan serta melestarikan purun yang ada di Pedamaran agar bisa menghasilkan karya anak bangsa.

Ratusan warga Pedamaran demo menuntut hak mereka agar menetapkan lahan gambut purun yang ada di Pedamaran menjadi hak kelola masyarakat dan kearifan local dengan suara lantangnya ratusan warga Pedamaran tersebut berorasi di

halaman DPRD sambil mengibarkan atribut spanduk yang salah satunya bertulisan Pmda jangan diam lahan gambut untuk kehidupan.²⁷ Dengan adanya demo ikut hadirnya dalam unjuk rasa itu perwakilan anggota DPRD, anggota polisi dan tentara yang berjaga-jaga untuk mengaman. Kaum hawa yang mayoritas merupakan perajin purun asal Desa Menang Jaya Kecamatan Pedamaran IV dan VI, mereka terlihat puas dan penuh harapan hal itu bukan hanya sekedar janji belaga ratusan massa dari Kecamatan Pedamaran yang dikordinir oleh Syafurudin Queshar dan Rian Saputra dalam tuntutan meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD OKI agar segera menerbitkan perda tentang perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Dalam²⁸ wawancara bapak Juniasyah Irawan bagian hukum di DPRD OKI mengenai aksi demo Pedamaran terhadap tuntutan lahan purun.

“Untuk saat ini belum ada perda tentang purun karena hasil rapat bersama anggota DPRD Komisi III dan komisi IV belum memenuhi syarat dari pembuatan perda pengajuan dari Pedamaran oleh karena itu pengajuan perda tentang purun belum di Acc atau tidak getok palu karena ada kesalahan dari tata ruang, lingkupan purunnya dll, sampai sekarang perda tidak di setuju atau belum ada perdes untuk dilanjuti.”

²⁷ Aksi demo masyarakat pedamaran. Globalplanet.new, diakses tanggal 15 november 2020

²⁸ Juniasyah irawan SH. MH, wawancara tanggal 5 januari 2021



Gambar 8.1 Gambar Demo di Kantor DPRD untuk Menuntut Perda

Keterangan diatas merupakan pertanyaan yang menyatakan bahwa dimana fungsi DPRD Kayuagung OKI memang mengawasi peraturan yang telah ada selaku pihak yang terlibat dalam aksi demo tuntutan purun dan pengajuan perda pada tahun 2018, membuktikan bahwa purun semakin berkurang dikarena mereka meminta agar lahan gambut purun yang termasuk dalam surat izin perusahaan yaitu PT Sampoerna Agro dan Rambang II agar segera keluarkan izin kedua perusahaan perkebunan, jika tidak ekosistem gambut purun tergerus sehingga lambat laun mata pencarian para perajin tikar purun hilang dan berdampak pada perekonomian mereka.

Wilayah purun merupakan kawasan gambut dengan hamparan purun yang luas berada di desa cinta jaya kecamatan Pedamaran, luas lahan gambut purun yang dimaksud adalah kurang lebih 300 sampai dengan, 700 hektar yang mana di manfaatkan masyarakat sekitar Pedamaran sejak dahulu sampai turun temurun.

Sedangkan dipeta kawasan Pedamaran timur, Mesuji raya, Mesuji makmur, dimana kawasan ini terdapat persebaran lahan terbakar, selain terdapat lahan rawa gambut yang dapat di fungsikan oleh masyarakat pedamaarn untuk pembuatan lahan, anyaman tikar, dll. Masyarakat Pedamaran dapat menyambung hidup dari hasil jualan anyaman tikar tersebut.



Gambar 9.1 Gambar Peta Pedamaran

“Dalam wawancara bersama bapak Abu masyarakat Pedamaran OKI masalah purun yang digunakan oleh masyarakat disana cara pengolahan purun , pertama mereka lihat dulu jenis purun apakah sudah layak digunakan untuk menganyam tikar²⁹“.

Perluasan perkebunan sawit ancaman bagi lingkungan maupun tradisi Pedamaran bagi masyarakat Pedamaran Kabupaten OKI , lahan gambut merupakan jantung kehidupan baik ketergantungan ekonomi maupun kehidupan sosial .³⁰

²⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat pedamaran oki.abu hasan. Pada tanggal 3-03-2021

³⁰ Gambaran bahan purun lokasi lahan purun.<https://m.republika.co.id>.diakses pada tanggal 26-02-2021



Gambar 10.1 Gambar Bahan Purun



Gambar 11.1 Lokasi Lahan Purun

Meluasnya perkebunan kelapa sawit di daerah berawa gambut di Kabupaten OKI Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan serta bencana kebakaran hutan di lahan yang musim kering ini tidak saja menimbulkan kerusakan lingkungan tetapi

mengancam kelangsungan kehidupan tradisi mata pencarian tambahan yang telah lama menunjang perekonomian masyarakat setempat, warga dari suku perdesa misalnya mereka memilih kerajinan warisan nenek moyang mereka yaitu, menganyam tikar, (herembak) bebahan baku purun, bergantung pada rawa gambut.

Bagi para petani perempuan di Kecamatan Pedamaran, menganyam atau berambat tikar purun merupakan keterampilan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka, dari luas area gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mencapai 150 H, 120 H, diantaranya berada dikawasan Pedamaran. Pekerja tikar purun tergantung pada aktivitas domestik perempuan dalam sehari, rata-rata perempuan di Menang Jaya bisa menyelesaikan tiga hingga empat helai tikar. Tingkat kerumitan terbilang tinggi, sehelai berukuran 2x1 meter hanya dihargai pengempul Rp. 10.000, hasil pengeluaran tersebut keuntungan dari jeri-jeri payah mereka hanya 3.000 setiap helainya, sementara Rp.7000 untuk menebus bahan baku tikar purun ³¹.



³¹ Para petani perempuan kecamatan pedamaran .<https://www.suara.com>.diakses pada tanggal 26-02-2021

Gambar 12.1

Dalam wawancara bersama nenek ida masyarakat Pedamaran.

”Dalam pelestarian lahan rawa gambut di Pedamaran sangat penting karena untuk meneruskan warisan nenek moyang siapa saja bisa mengelola lahan rawa gambut tanpa terkecuali pelestarian dari lahan rawa gambut di Pedamaran sendiri harus dilakukan terus menerus sehingga, bertujuan agar tetap terjaga keberadaan lahan rawa gambut ini memiliki berbagai potensi, selain berfungsi menganyam tikar bisa juga diolah menjadi tas, wadah buah, sangki dan hanya lagi , lahan rawa gambut juga menjadi mata pencarian tambahan masyarakat”.



Gambar 13.1

Tidak itu saja masyarakat menambah ciri khas yaitu kerupuk ,kemplang, empek-empek Pedamaran. Berdasarkan data diatas penelitian menyimpulkan bahwa nilai yang menentukan keterangan-keterangan mengenai lahan rawa gambut, dimana keberadaan lahan tersebut semakin berkurang tentu banya yang berdampak merugikan bagi masyarakat Pedamaran, sehingga adanya penjagaan diharapkan mampu mengurangi kebakaran lahan rawa gambut. Oleh karena itu, adanya

partisipasi masyarakat untuk melindungi rawa gambut dari kebakaran, adanya nilai ketetapan pada suatu pelestarian lahan rawa gambut patut dilaksanakan sebab lahan rawa gambut perlu dijaga keberdaanya yang memiliki banyak fungsi dan potensi bagi masyarakat Pedamaran OKI dan pemerintahan Kayuagung terkhusus Pedamaran yang berada disekitar lahan rawa gambut tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian lapangan peneliti yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa. Upaya perlindungan hak untuk Hidup sebagai warga Negara dalam perspektif politik (studi tentang ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan Pedamaran OKI). Kebijakan pemerintahan kota kayuagung di pedamaran pelestarian lahan rawa gambut di pedamaran timur dengan melakukan kelestarian lahan rawa gambut.

Untuk saat ini kebijakan dari pemerintah Kayuagung dalam mengatasi perlindungan lahan rawa gambut dalam pembuatan perda belum terlaksana tetapi salah satu upaya telah dilakukan masyarakat Pedamaran dengan cara beramai-ramai demo dikantor Pemkab OKI dan DPRD untuk segera mengeluarkan Perda/Perdes agar lahan gambut tetap terjaga dari ekosistem. Masyarakat Pedamaran meminta pembagian lahan rawa gambut dilarang untuk di ahli fungsikan kegunaanya atau lahan yang dilestarikan oleh pemerintah untuk masyarakat Pedamaran agar tetap digunakan untuk pembuatan anyaman tikar dll.

B. Saran.

Kepada masyarakat pedamaran seharusnya lebih turut aktif dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat kalian jika tidak ingin fungsi dan lahan gambut purun yang kalian anggap penting dan jika tidak ingin terkena dampak dari kerusakan lahan rawa gambut.

Sebagai pemerintahan PEMKAB dan DPRD selaku pihak yang ikut serta dalam proses pembuatan Perdes segera mengeluarkan Perdes tersebut agar masyarakat Pedamaran tidak terbebani oleh oknum yang merusak pelestarian lahan rawa gambut yang bisa berdampak buruk pada ekonomi mereka, untuk pihak swasta yang memiliki kepentingan menanam sawit dan mengambil ahli fungsi sebuah lahan seharusnya lebih memikirkan dampaknya yang bisa merusak dan bekurangnya lahan rawa gambut. Untuk masyarakat seharusnya lebih aktif lagi agar cepat segera tuntas permasalahan dalam pembuatan perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

B, S. (n.d.). *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice (the hague martinus nii hoff)*. 23/11/2019.

Metode Penelitian. (2007). Bandung: Al Fabeta.

Narmo Dwi, S. m. (2016). *Pradigma Lain pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Penelitian, M. (2007). Bandung: Al Fabeta.

Rahmat, J. (2007). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Resdakarya.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian* . Bandung: Al Fabeta CV.

Sutopo. (Maret 2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukarta: Universitas Press.

INTERNET :

(2020, 03 09). Retrieved from [https://id.m.wikipedia.org.pedamaran ogan komering ilir](https://id.m.wikipedia.org.pedamaran%20ogankomeringilir).

(2020, 03 09). Retrieved from <https://id m.wikipedia.org pedamaran ogan komering ilir>.

Demo Kantor Bupati OKI. (2019, 11 23). Retrieved from [Tabloid kontras.com](http://Tabloid.kontras.com).

Demo Kantor DPRD. (2020, 08 11). Retrieved from [Sumsel Today.com](http://Sumsel.Today.com).

Gambaran Bahan Purun, Lokasi Lahan Purun. (2021, 02 2021). Retrieved from <https://m.republika.co.id>.

Gambaran Kebakaran Lahan di Pedamaran. (2021, 02 25). Retrieved from <https://www.mongabai.co.id>.

Gambaran Kebakaran Lahan Gambut. (2021, 02 26). Retrieved from Tribun Sumsel wiki, tribun news.com.

Kewarganegaraan Menyiratkan Status Kebebasan dan Tanggung Jawab oleh Negara. (2021, 02 24). Retrieved from <https://Kampus.com>.

Para Petani Perempuan Kecamatan Pedamaran . (2021, 02 26). Retrieved from <https://www.suara.com>.

Penyimpatan Lahan Gambut Mulai Terasa Sejak Kebakaran Hutan dan Lahan pada Tahun 2015. (2019, 11 24). Retrieved from <https://m.rri.co.id>.

Rawa Gambut di Pedamaran Timur dijadikan Persawahan dibiarkan Sebagai Santra Purun (Rumputan). (2021, 02 25). Retrieved from pantau.gambutillustration.

Sumber dari badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir. (2020, 03 03).
website:<https://okikab.bps.go.id>. (2020, 03 03).

Politik Kewarganegaraan dapat dibentuk disepertikan banyak prinsip yang secara umum dapat digolongkan 6 pemikiran. (2019, 12 03). Retrieved from Ditjenpp.Kemenkumham.go.id.

JURNAL :

Barkry ryan, *implementasi hak asasi manusia dalam konsep good governance di Indonesia*, tensis. Pada tanggal 24/11/2019.

Yuswandi Ali, (1995). *Penuntutan, Hapusnya kewenangan Menuntut dan Menjalankan pidana*, cv pedoman ilmu jaya, Jakarta. Pdf pada tanggal 22/11/2019 .

Pedoman Wawancara:

Pedoman wawancara ini digunakan Untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian:

Bagaimana Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Sebagai Warga Negara (studi tentang Ketersediaan lahan purun sebagai sumber mata pencarian Kecamatan Pedamaran)

- a. Adakah Pemerintahan daerah Kabupaten, Mengetahui keberadaan dan manfaat lahan purun?
- b. Usaha apa yang pernah kalian lakukan untuk masyarakat Pedamaran?
- c. Bagaimana kelolahan lahan purun tersebut?
- d. Adakah kepemilikan lahan purun rawa gambut?
- e. Bagaimana pendapat masyarakat Pedamaran terhadap pengurangan lahan rawa gambut?
- f. Bagaimana peran kepala Desa untuk Masyarakat Pedamaran?
- g. Bagaimana tanggapan kalian terhadap aksi demo Masyarakat Pedamaran?
- h. Adakah lahan yang di sediakan untuk masyarakat Pedamaran agar mereka tetap bisa melestarikan purun tersebut?

DOKUMENTASI

Dokumentasi ini berupa foto terakhir setelah melakukan wawancara bersama masyarakat.









**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : **Meiyanti**
Nomor Induk Mahasiswa : **1657020067**
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi : *Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Yang Layak Sebagai Warga Negara Dalam Perspektif Politik (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun Sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)*

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 27 Mei 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama	: Meiyanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 1657020067
Jurusan/Program Studi	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: <i>Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Yang Layak Sebagai Warga Negara Dalam Perspektif Politik (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun Sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)</i>

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ____

Palembang, 27 Mei 2021
Ketua Sidang

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : **Meiyanti**
Nomor Induk Mahasiswa : **1657020067**
Jurusan/Program Studi : **Ilmu Politik**
Judul Skripsi : *Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Yang Layak Sebagai Warga Negara Dalam Perspektif Politik (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun Sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir)*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif ---. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ainur Ropik, M.Si.	Pembimbing I	
2	Vita Justisia, SH., MH.Kn.	Pembimbing II	
3	Prof. Dr. H. Izomiddin, MA.	Penguji I	
4	Ryllian Chandra Eka Viana, MA.	Penguji II	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 27 Mei 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI
NIP. 197409242007012016

Sekretaris

Raegen Harahap, MA.
NIDN. 2011059202



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: www.radenfatah.ac.id,
Email: fisip_uin@radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

Nama Mahasiswa : Meiyanti
Nim : 1657020067
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Yang Layak Sebagai Warga Negara (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun Sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran OKI)
Pembimbing I : Ainur Ropik, M.Si
Pembimbing II : Vita Justisi, M.H., M.Kn

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tanda tangan Pembimbing
1	13/02-2020	Perbaikan Judul, Perhatikan huruf kapital Teori di per gelas	
2	16/02. 2020	Perbaikan Bab I.	
3	17/02. 2020	Teori di per gelas	
4	20/02 -2020	Acc lanjut Bab II	
5	6/02. 2021	Cara susunan angka dan huruf	
6	8/02. 2021	Perbaikan susunan Huruf	
7	12/02. 2021	Perbaikan spasi dan susunan	
8	23/02. 2021	Acc lanjut Bab 3. dan 4	
9	29/02. 2021	Perbaikan, konsisten double spasinya	



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Re. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 355347, Fax. (0711) 354668, Website: www.radenfatah.ac.id
Email: info_uin@radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

Nama Mahasiswa : Meryanti
Nim : 1657020067
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hak Untuk Hidup Yang Layak Sebagai Warga Negara (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun Sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran OKI)
Pembimbing I : Ainur Ropik, M.Si
Pembimbing II : Vita Justisi, M.H, M.Kn

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tanda tangan Pembimbing
1	13/02-2020	Perbaikan Judul, Perhatikan huruf kapital Teori di Pergelas	
2	16/02-2020	Perbaikan Bab I	
3	17/02-2020	Teori di Pergelas	
4	20/02-2020	Acc lanjut Bab II	
5	6/02-2021	Cara susun angka dan huruf	
6	8/02-2021	Perbaikan susunan Huruf	
7	12/02-2021	Perbaikan spasi dan susunan	
8	23/02-2021	Acc lanjut Bab 3, dan 4	
9	24/02-2021	Perbaikan, konsisten double spacingnya	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

No. Prof. KH Zainal Abidin Fauzi (KEM 3.5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: www.radenfatah.ac.id,
Email: fkip_uin@radenfatah.ac.id

No	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tanda tangan Pembimbing
10	25/02.2021	Perbaikan, huruf besar/kapital	
11	27/02.2021	Perhatikan koma/dititik jangan merapat dititik, baru spasi	
12	9/03.2021	ditambahkan lagi pembetulan dikembalikan ke hasil penelitian, kondisi Redamoran yang saya temui disana	
13	10/03.2021	ganti judul bagus karena kekesimpulan dan perbaikan tulisan dan spasi	
14	23/03.2021	format abstrak dll	
15	24/03.2021	format kompre dan munagozyah	



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Simpang Kijang No.40 Dese Celikah

KAYUAGUNG

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/RISET

Nomor: 541/Ban.KBP-PK/2020

MEMBACA

: Surat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor : B/094/Un.09/VIII/TL.01/09/2020

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 070/1542/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin Penelitian/survei/riset di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sProvinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/A/VI/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin Penelitian/survei/riset di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan.

DIBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama : Meiyanti
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : *Upaya Perlindungan Hak untuk Hidup Layak sebagai Warga Negara (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran OKI).*
Lokasi Penelitian : Kabupaten Ogan Komering Ilir
Bidang : Sosial
Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan
Penanggungjawab : Prof. Dr. Izomiddin, MA.
Maksud/Tujuan : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Akan melakukan penelitian/survei/riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian/Survei/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor, Camat setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian/Survei/Riset yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan sesuai Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Penelitian/Survei/Riset belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survei/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Setelah selesai kegiatan Penelitian/Survei/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian/Survei/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pemberitahuan/Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 23 Desember 2020

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional,



LUKSMAN, S.Pd, M.Si
Pembina

NIP. 196509211991031003

Tembusan:

1. Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai laporan)
2. Kabag Kesra Pemerintahan Kab.OKI
3. Komisi IV DPRD Kab.OKI
4. Peneliti yang bersangkutan
5. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Nomor : 6757/UIN.09/VIII/PP.01/209/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth
Bupati Ogan Komering Ilir
02. Kabag Kesra Pemerintahan Kab. OKI
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Meliyani
NIM : 1657020067
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : "Upaya Perlindungan Hak untuk Hidup Layak sebagai Warga Negara (Studi Tentang Ketersediaan Lahan Purun sebagai Sumber Mata Pencarian Kecamatan Pedamaran OKI)."

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

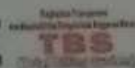
Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 23 Desember 2020

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Tikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
Telp. (0711) 354068 website : www.fisip.radenfatah.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

LEMBAR DISPOSISI / SARAN

Indeks : <u>56-15</u>	Kode : <u>VI</u>	Nomor Urut <u>(001)</u>	Tgl. Pengiriman
Perihal : Isi Ringkasan : <u>Permohonan izin penelitian</u>			
Asal Surat <u>UIN Paderan</u>	Tgl.	Nomor <u>56-15 / 001 / 2020</u>	Lampiran
Diteruskan kepada : <u>Aw. Bupati As. II</u> <u>12/2/2020</u> <u>YK. Dp. Sekda</u>		Instruksi / Informasi <u>dit. vdt. Ka. Kesbangpol,</u> <u>untuk ditinjau</u> <u>lanjuti</u> <u>03/2020</u>	
- Ditentukan Permohonan izin penelitian An. Maipati wks Fisp UIN Kasan Patah Palembang. - Saran : uka diteliti oleh Kasan Kesbangpol Okl Rg. Kasan Patah Lajud <u>23/2020</u> <u>II</u>			